

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN
PEGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Aktiva Pajak Tangguhan

2.1.1.1 Pengertian Aktiva Pajak Tangguhan

Menurut Waluyo (2008:217), aktiva pajak tangguhan adalah aktiva yang terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut Undang – undang.

Sementara itu Harnanto (2013:110), mendefinisikan aktiva pajak tangguhan yaitu:

Sebagai dampak yang terjadi akibat adanya PPh di masa yang akan datang namun dipengaruhi oleh adanya perbedaan waktu antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat digandakan pada periode yang akan datang.

Sedangkan Mohammad Zain (2008:200), mendefinisikan aset pajak tangguhan sebagai perbedaan yang muncul apabila penghasilan sebelum pajak lebih kecil dari pada penghasilan kena pajak, yang berarti beban pajaknya pun akan lebih kecil dari pajak terutang.

Sehingga berdasarkan pengertian beberapa ahli di atas, aktiva pajak tangguhan adalah perbedaan yang timbul karena adanya koreksi positif yang mengakibatkan pajak terutang menurut akuntansi fiskal lebih besar dari pada beban pajak menurut akuntansi komersial.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007), nilai tercatat aktiva pajak tangguhan harus ditinjau kembali pada tanggal neraca. Perusahaan harus menurunkan nilai tercatat apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkonsasi sebagian atau semua aktiva pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai. Dengan adanya kewajiban untuk melakukan peninjauan kembali pada tanggal neraca, maka setiap tahun manajemen harus membuat suatu penilaian untuk menentukan saldo aktiva pajak tangguhan dan pencadangan aktiva pajak tangguhan. Sedangkan penilaian manajemen untuk menentukan saldo cadangan aktiva pajak tangguhan tersebut bersifat subjektif (Suranggane, 2007:81)

SFAS No. 109 mengungkapkan bukti – bukti positif yang menghindari pembentukan penyisihan dan bukti – bukti negatif yang mendukung pembentukan penyisihan tersebut. Bukti positif yang mengindikasikan bahwa lebih dari 50% kemungkinan realisasi di masa yang akan datang atas aktiva pajak tangguhan sehingga tidak diperlukan pembentukan penyisihan (Kiswara, 2009:40 dalam Khairunnisa, 2017:17), diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat sejarah laba yang besar secara konsisten
- 2) Laba yang akan datang dapat dijamin terjadinya
- 3) Terdapat penghasilan kena pajak dimasa depan yang wajar, dan timbul dari pembalikan beda waktu (kewajiban pajak tangguhan) dalam merealisasi manfaat dari aktiva pajak
- 4) Strategi perencanaan pajak yang baik berguna dalam penyajian realisasi aktiva pajak tangguhan

- 5) Nilai buku aktiva melebihi basis pajak adalah cukup dalam merealisasikan aktiva pajak tangguhan

Dengan diberlakukannya PSAK No. 46 yang mensyaratkan para manajer untuk mengakui dan menilai kembali aktiva pajak tangguhan yang dapat disebut pencadangan nilai aktiva pajak tangguhan. Peraturan ini dapat memberikan kebebasan manajemen untuk menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian aktiva pajak tangguhan pada laporan keuangannya, sehingga dapat digunakan untuk mengindikasikan ada tidaknya rekayasa laba atau manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan dalam rangka menghindari penurunan laba atau kerugian.

2.1.1.2 Indikator Aktiva Pajak Tangguhan

Waluyo (2008:217) dalam Widiatmoko dan Mayangsari (2015), menyatakan bahwa rumus dari aktiva pajak tangguhan adalah selisih antara aktiva pajak tangguhan periode sekarang dan periode yang lalu, sehingga dalam penelitian ini aktiva pajak tangguhan sebagai variabel bebas diukur dengan perubahan nilai aktiva pajak tangguhan pada periode t dengan $t-1$ dibagi dengan nilai asset pajak tangguhan pada periode t . adapun perumusannya sebagai berikut :

$$APT_{it} = \frac{\Delta \text{Aktiva pajak tangguhan}_{it}}{\text{Aktiva pajak tangguhan}_{it}}$$

2.1.2 Beban Pajak Tangguhan

2.1.2.1 Pengertian Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan (PPh) terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan/pendapatan pajak tangguhan. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah

PPh terutang atas Penghasilan Kena Pajak pada satu periode. Sedangkan beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan dan pendapatan pajak tangguhan akan menimbulkan aktiva pajak tangguhan (Agoes dan Trisnawati, 2009:242).

Sedangkan menurut Harnanto (2013:112), beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak).

Adapun Sumomba (2010) mendefinisikan beban pajak tangguhan sebagai beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi yang disusun berdasarkan SAK dengan laba fiskal yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan.

Menurut PSAK No.46 (IAI, 2009: 8) pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasi pada periode mendatang.

Sehingga dari berbagai pengertian di atas dapat dikatakan bahwa beban pajak tangguhan merupakan beban pajak yang timbul karena adanya koreksi negatif yang menyebabkan pajak terutang menurut akuntansi fiskal lebih kecil dibandingkan beban pajak menurut akuntansi komersial.

2.1.2.2 Perbedaan Temporer dan Perbedaan Permanen

Pajak tangguhan merupakan dampak PPh di masa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer antara perlakuan akuntansi dengan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu (Cheng, 2009 dalam Sumomba, 2010:84).

1) Perbedaan Temporer atau Waktu

Dalam PSAK No. 46 tahun 2013 perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat asset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa:

- (a) Perbedaan temporer kena pajak, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam perhitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode mendatang ketika jumlah tercatat asset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.
- (b) Perbedaan temporer dapat dikurangkan, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode mendatang ketika jumlah tercatat asset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.

Perbedaan temporer dimaksudkan sebagai perbedaan antara dasar pengenaan pajak (*tax base*) dari suatu asset atau liabilitas dengan nilai tercatat pada asset atau liabilitas yang berakibat pada perubahan laba fiskal periode mendatang. Terjadinya perubahan tersebut dapat

bertambah (*future taxable amount*) atau berkurang (*future deductible amount*) pada saat asset dipulihkan atau pada saat liabilitas dilunasi/sibayar. Perbedaan temporer ini berakibat harus diakuinya asset dan/atau liabilitas pajak tangguhan. Hal ini dapat terjadi pada kondisi berikut (Waluyo, 2014: 275):

- (a) Penghasilan atau beban yang harus diakui untuk menghitung laba fiskal atau laba komersial dalam periode yang berbeda.
- (b) *Goodwill* atau *goodwill* negatif yang terjadi saat konsolidasi.
- (c) Perbedaan nilai tercatat dengan *tax base* dari suatu asset atau liabilitas pada saat pengakuan awal.
- (d) Bagian dari biaya perolehan saat penggabungan usaha yang bermakna akuisisi dialokasikan ke asset atau liabilitas tertentu atas dasar nilai wajar, perlakuan akuntansi demikian tidak diperkenankan oleh Undang – Undang pajak.

Adapun menurut Marisi P. Purba (2009:35) kewajiban pajak tangguhan harus diakui untuk setiap beda temporer kena pajak. Namun, tidak semua beda temporer dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. Terdapat beberapa pengecualian, diantaranya:

- (a) Kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari beda temporer investasi pada perusahaan asosiasi, anak perusahaan, dan joint venture tidak diakui apabila induk perusahaan dan partner dapat mengendalikan waktu reversal beda temporer tersebut.
- (b) Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan awal goodwill yang berasal dari penggabungan usaha.
- (c) Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan aktiva dan kewajiban dalam suatu transaksi yang bukan merupakan transaksi penggabungan usaha. Transaksi penggabungan usaha tersebut tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba yang dikenakan pajak.

2) Perbedaan Permanen atau Tetap

Menurut Waluyo (2015:275), perbedaan permanen merupakan perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan perundang – undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi

yang sifatnya permanen atau tetap. Artinya, perbedaan ini tidak akan hilang sejalan dengan waktu. Perbedaan tetap timbul sebagai akibat adanya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan pelaporan pajak (fiskal). Akibat dari perbedaan ini berdampak pada laba komersial dan laba fiskal sebagai dasar menghitung pajak yang terutang.

2.1.2.3 Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Terdapat beberapa perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal dalam segi metode yang digunakan untuk perhitungan masa manfaat, harga perolehan, dan penyusutan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Suandy (2003:39) perbedaan tersebut yaitu:

Tabel 2.1 Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Perbedaan	Akuntansi Komersial	Akuntansi Fiskal
Masa Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> Masa manfaat ditentukan aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis. Ditelaah ulang secara periodik Nilai residu bisa diperhitungkan 	<ol style="list-style-type: none"> Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Nilai residu tidak diperhitungkan.
Harga Perolehan	<ol style="list-style-type: none"> Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya. Untuk penukaran aktiva tidak sejenis menggunakan harga wajar. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku aktiva yang dilepas. Aktiva sumbangan berdasarkan harga 	<ol style="list-style-type: none"> Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga sesungguhnya. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar. Untuk transaksi tukar menukar adalah berdasarkan harga pasar.

	pasar	<p>4. Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan.</p> <p>5. Jika direvaluasi adalah sebesar nilai setelah revaluasi.</p>
Metode Penyusutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Garis lurus 2. Jumlah angka tahun 3. Saldo menurun 4. Metode jam jasa 5. Unit produksi 6. Anuitas 7. Sistem persediaan <p>Perusahaan dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten dan harus ditelaah secara periodik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk aktiva tetap bangunan adalah garis lurus 2. Untuk aktiva tetap bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun asalkan ditetapkan secara taat asas.
Metode Penilaian Persediaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. FIFO 2. LIFO 3. Rata – rata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. FIFO 2. Rata – rata

2.1.2.4 Indikator Beban Pajak Tangguhan

Menurut Harnanto (2013:12), beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Beban pajak tangguhan dapat diukur dengan menggunakan indikator beban pajak tangguhan periode saat ini dengan total aset periode sebelumnya. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya beban pajak tangguhan menurut Fitriany (2015) adalah sebagai berikut:

$$DTEit = \frac{\text{Beban pajak tangguhan}_t}{\text{Total Asset}_{t-1}}$$

2.1.3 Manajemen Laba

2.1.3.1 Pengertian Manajemen Laba

Belkaoui (2007:201), mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut:

Perilaku yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk meningkatkan atau menurunkan laba dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Adapun Subramanyam (2017: 117), menyatakan manajemen laba merupakan:

Upaya intervensi dengan tujuan tertentu oleh manajemen dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan sendiri. Manajemen laba sering melibatkan *window – dressing* atas laporan keuangan, khususnya jumlah laba *bottom – line*.

Sedangkan H. Sri Sulistyanto (2008:48), mendefinisikan laba sebagai proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas – batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan.

Sehingga dari pengertian beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan upaya intervensi yang dilakukan oleh manajer untuk memanipulasi laporan keuangan dalam hal ini adalah penyajian laba yang akan dilaporkan kepada pihak eksternal guna kepentingan pribadi.

2.1.3.2 Jenis – Jenis Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2012:27) manajemen laba dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

- 1) *Income Minimization*, manajemen laba ini dilakukan pada saat perusahaan mempunyai keuntungan yang tinggi dan tujuan perusahaan adalah untuk menghindari atau meminimalisasi pajak.
- 2) *Income Maximization*, pola ini dilakukan saat manajemen berusaha meningkatkan pendapatan dengan melaporkan laba bersih yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar, yaitu dengan cara mengakui pendapatan periode berikutnya ke periode sekarang atau mengakui beban periode sekarang ke periode mendatang.
- 3) *Taking Bath*, pola ini biasanya dilakukan pada saat perusahaan mengalami restrukturisasi, yaitu dengan mengakui biaya yang sebenarnya baru terjadi di periode yang akan datang ke periode sekarang. Hal tersebut dilakukan untuk mendapat keuntungan yang tinggi pada periode mendatang.
- 4) *Income Smoothing* (perataan laba), manajemen memiliki insentif untuk melakukan perataan penghasilan untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga perusahaan terlihat stabil.

2.1.3.3 Motivasi Manajemen Laba

Sulistyanto (2008:65) mengemukakan beberapa motivasi mengenai terjadinya manajemen laba, diantaranya:

1) Motivasi Pasar Modal

Sebagai perusahaan dengan kepemilikan terbuka, maka kepemilikan dibagi – bagi untuk siapapun yang memegang saham perusahaan yang bersangkutan. Setiap pemegang saham mempunyai hak suara untuk menentukan siapa yang harus mengelola dan membuat kebijakan dasar perusahaan. selain itu integritas dan kredibilitas perusahaan merupakan kunci utama diterima atau tidaknya saham perusahaan itu oleh publik.

Publik cenderung akan memilih perusahaan – perusahaan yang dikelola oleh para professional yang integritas dan kredibilitasnya teruji. Inilah yang menyebabkan pemegang saham menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada orang lain. Oleh sebab itu, pemisahan kepemilikan dan pengelolaan di perusahaan terbuka merupakan hal yang penting. Namun secara konseptual pemisahan ini mendorong terjadinya asimetri informasi antara manajer perusahaan dengan pihak eksternal yang tidak mempunyai akses dan sumber informasi yang memadai. Sebagai pihak yang menguasai informasi lebih banyak dibandingkan pihak lain, manajer akan berperilaku oportunistis yaitu dengan mendahulukan kepentingannya diatas kepentingan pihak lain. Kewajiban manajer untuk mengungkapkan semua informasi mengenai nilai dan kondisi fundamental perusahaan kedalam laporan keuangan dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi. Hal ini dilakukan

dengan menyembunyikan, menunda pengungkapan, atau mengubah informasi fundamental menjadi informasi palsu pada saat perusahaan akan melakukan suatu transaksi tertentu.

2) Penawaran Saham Perdana

Perusahaan cenderung menginformasikan hal – hal yang positif agar investor juga secara positif merespon saham yang ditawarkan. Manajer akan menyembunyikan, menunda, atau mengubah informasi yang dapat membuat investor mempunyai persepsi negatif terhadap perusahaan, sebab hal ini akan mengakibatkan harga saham perusahaan bersangkutan jatuh. Inilah sebabnya mengapa manajer melakukan manajemen laba pada saat penawaran saham perdana. Perusahaan memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba yang dapat meningkatkan penerimaan melalui pengaturan tingkat laba yang dilaporkan dalam prospectus. Perusahaan akan melaporkan labanya lebih tinggi (*overstate*) dibandingkan laba sesungguhnya ketika penawaran tersebut berlangsung.

3) Motivasi Konstruktual

Terdapat dua motivasi konstruktual yaitu:

(a) Kompensasi manajerial. Kompensasi manajerial merupakan dorongan bagi manajer dalam melaporkan laba yang diperolehnya untuk mendapatkan atau memperoleh bonus yang dihitung berdasarkan laba yang diperoleh.

(b) Pelanggaran perjanjian utang. Pelanggaran perjanjian utang membuktikan adanya penggunaan akrual dengan menaikkan laba

dalam laporan keuangan tahunan perusahaan yang melanggar perjanjian itu.

4) Motivasi Regulasi

Ada beberapa alasan mengapa manajer mempunyai motivasi regulasi (politik) untuk melakukan pelanggaran berbagai regulasi pemerintah.

Perusahaan yang melakukan pelanggaran semacam ini akan merekayasa labanya agar terlihat lebih rendah dibandingkan laba sesungguhnya. Perusahaan melakukan rekayasa ini agar dapat mempengaruhi keputusan pengadilan dalam menetapkan penalti terhadap perusahaan yang mengalami *damage award*, selain itu rekayasa dilakukan agar perusahaan menerima subsidi dari pemerintah dan dapat melakukan upaya penghindaran pajak.

Sedangkan Scoot (2003) menyatakan bahwa terdapat enam hal yang memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba, diantaranya:

1) Pola Bonus

Pola motivasi ini diasumsikan bahwa manajer – manajer perusahaan yang menggunakan rencana bonus akan memaksimalkan pendapatan tahun berjalan mereka. Manajer yang bekerja di perusahaan dengan rencana bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang diterimanya.

2) Perjanjian hutang

Pada motivasi ini diasumsikan bahwa semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggaran perjanjian hutang maka manajer cenderung akan memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan laba periode

mendatang ke periode berjalan sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak.

3) Motivasi Politik

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menciptakan peraturan yang lebih ketat.

4) Motivasi Pajak

Pajak merupakan motivasi yang paling jelas dalam manajemen laba, karena pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan. Bagian dalam perusahaan yang menangani pajak cenderung untuk menjalankan peraturan akuntansinya sendiri untuk mengkalkulasikan pendapatan kena pajak. Dalam hal ini manajer berusaha untuk menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

5) *Initial Public Offering* (IPO)

Saat perusahaan *go public*, informasi keuangan merupakan informasi yang penting bagi calon investor. Informasi yang didapatkan oleh calon investor menilai seberapa baik perusahaan yang akan mempengaruhi keputusan calon investor, maka dari itu manajer berusaha untuk menaikkan laba yang dilaporkan.

6) Pergantian Pemimpin

Manajemen laba diperkirakan terjadi pada periode pergantian pemimpin. Contohnya motivasi perencanaan bonus memprediksi bahwa pemimpin yang akan pensiun akan secara khusus membuat

strategi *income maximization* untuk meningkatkan bonus mereka. Begitu juga dengan pemimpin dari perusahaan berkinerja buruk mungkin akan melakukan *income maximization* untuk mencegah atau menunda pemecatan.

Berdasarkan penjelasan motivasi laba diatas, dapat dikatakan bahwa terdapat suatu kondisi tertentu dimana manajer akan termotivasi untuk melakukan manajemen laba. Kondisi tersebut adalah ketika manajer tidak berhasil mencapai target laba yang telah ditentukan ataupun ketika laba yang dihasilkan melebihi target yang ditentukan.

2.1.3.4 Objek Manajemen Laba

Beberapa komponen laporan keuangan yang mudah untuk dipermainkan dengan memanfaatkan kebebasan dalam memilih metode akuntansi dan menentukan nilai estimasi. Komponen – komponen ini seringkali digunakan sebagai objek rekayasa manajerial (Sulistyanto, 2008:183), yaitu:

1) Aktiva Lancar

Aktiva lancar merupakan komponen likuid dan mudah untuk menjadi objek manajemen laba di suatu perusahaan. Upaya ini dilakukan terhadap komponen kas yang dapat dilakukan dengan mempermainkan transaksi – transaksi yang berhubungan dengan transaksi ini. Untuk menutupi kecurangan ini pelaku akan memanfaatkan komponen – komponen akrual yang mempunyai hubungan dengan kas. Upaya rekayasa terhadap komponen ini dilakukan dengan mempermainkan besar kecilnya komponen bersangkutan dengan menggunakan metode

akuntansi. Terdapat empat komponen utama aktiva lancar yang selama ini dikenal dan dipakai sebagai objek rekayasa manajemen laba, yaitu:

- (a) Kas dan komponen lain yang setara kas (*cash*) yang dicatat sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan.
- (b) Piutang usaha (*account receivable*) yang dicatat pada jumlah estimasi yang mungkin dapat ditagi atau direalisasi.
- (c) Persediaan (*inventory*) yang dicatat pada nilai wajarnya.
- (d) Komponen biaya dibayar dimuka (*prepaid items*) yang dicatat sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan secara tunai.

2) Aktiva Tetap

Merupakan harta perusahaan yang mempunyai wujud fisik, dipakai dalam operasi normal perusahaan, dimiliki perusahaan lebih dari satu periode akuntansi, dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Aktiva tetap dapat diklasifikasikan menjadi aktiva tetap yang umurnya terbatas dan aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas. Hanya aktiva tetap dengan umur terbatas yang dapat dipakai sebagai objek rekayasa manajerial, sedangkan aktiva tetap dengan umur tidak terbatas relatif sulit untuk dijadikan objek rekayasa manajerial.

3) Utang Lancar

Merupakan pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan perusahaan dimasa depan dalam bentuk penyerahan barang atau jasa yang disebabkan transaksi atau peristiwa di masa lalu. Beberapa upaya rekayasa manajerial yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan utang lancar yaitu:

- (a) Mengakui dan mencatat transaksi pembelian lebih besar dibandingkan pembelian sesungguhnya.
- (b) Menunda mengakui pendapatan diterima dimuka sebagai pendapatan periodik.
- (c) Menunda mengakui biaya yang masih harus dibayar sebagai biaya periodik.
- (d) Menunda mengakui utang jangka panjang yang jatuh tempo.

2.1.3.5 Pendekatan Manajemen Laba

Secara umum terdapat tiga pendekatan yang telah dihasilkan para peneliti untuk mendeteksi adanya manajemen laba (Sulistiyanto, 2008:211), yaitu:

1) *Aggregate Accrual Basis Model*

Model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Healy, DeAngelo, dan Jones. Selanjutnya Daechow, Sloan, dan Sweeney mengembangkan model Jones menjadi model Jones yang dimodifikasi (*modified Jones model*). Model – model ini menggunakan total akrual dan model regresi untuk menghitung akrual yang diharapkan dan akrual yang tidak diharapkan.

2) *Specific Accruals Basis Model*

Pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item atau komponen laporan keuangan tertentu di industri tertentu. Misalnya piutang tak tertagih dari sektor industry

tertentu atau cadangan kerugian piutang dari industry asuransi. Model ini dikembangkan oleh McNichols dan Wilson dengan menggunakan sisa provisi untuk piutang tak tertagih yang diestimasi sebagai sisa regresi provisi untuk piutang tak tertagih pada saldo awal. Serta penghapusan piutang periode berjalan dan periode yang akan datang sebagai proksi manajemen laba.

3) *Distribution of Earnings After Management Basis Model*

Pendekatan ini dikembangkan oleh Brughtahler dan Dichev, Dereorge, Patel, dan Zackhauster serta Myers dan Skinner. Pendekatan ini dikembangkan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen laba untuk mendeteksi faktor – faktor yang mempengaruhi pergerakan laba. Model ini terfokus pada pergerakan laba disekitar *benchmark* yang dipakai. Misalnya laba kuartal sebelumnya, untuk menguji apakah *incidence* jumlah yang berada diatas maupun dibawah *benchmark* telah didistribusikan secara merata, atau merefleksikan ketidakberlanjutan kewajiban untuk menjalankan kewajiban yang telah dibuat.

2.1.3.6 Mekanisme Manajemen Laba

Menurut Setiawati dan Na'im (2000) dalam Khairunnisa (2015:23), manajemen laba dapat dilakukan dengan menggunakan tiga cara, yaitu:

- 1) Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi. Hal ini berarti bahwa manajemen dapat mempengaruhi laba melalui perkiraan terhadap estimasi akuntansi, antara lain: estimasi tingkat piutang tak

tertagih, estimasi kurun depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain – lain.

- 2) Mengubah metode akuntansi. Dalam hal ini manajemen laba dapat dilakukan dengan mengubah metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi. Salah satu contohnya adalah dengan mengubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.
- 3) Menggeser periode pendapatan atau biaya. Manajemen laba dapat dilakukan dengan cara menggeser periode pbiaya atau pendapatan. Beberapa contohnya yaitu: mempercepat atau menunda pengeluaran penelitian sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran produksi sampai periode berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak terpakai.

Sedangkan Subramanyam (2017:119), menyatakan bahwa manajemen laba dapat dilakukan dengan pergeseran laba dan klasifikasi manajemen laba.

1) Pergeseran Laba

Merupakan proses pengelolaan laba dengan mengalihkan laba dari satu period ke periode lainnya. Pergeseran laba dilakukan dengan mempercepat atau, menunda pengakuan pendapatan atau beban.

Contoh dari pergeseran laba diantaranya:

- (a) Mempercepat pengakuan pendapatan dengan meyakinkan *dealer* atau grosir untuk membeli kelebihan produk di pengujung akhir tahun fiskal.

- (b) Menunda pengakuan beban dengan mengkapitalisasi beban dan mengamortisasinya selama periode mendatang.
- (c) Menggeser beban ke periode berikutnya dengan mengadopsi metode akuntansi tertentu.
- (d) Menggunakan biaya satu kali yang besar seperti penurunan nilai asset dan biaya restrukturisasi secara berselang. Hal ini memungkinkan untuk mempercepat pengakuan beban sehingga membuat laba berikutnya terlihat lebih baik.

2) Klasifikasi Manajemen Laba

Bentuk yang paling umum dari klasifikasi (penggolongan) manajemen laba adalah memindahkan beban dibawah garis, yang berarti melaporkannya bersamaan dengan pos tidak biasa dan tidak berulang yang biasanya dianggap kurang penting oleh analis. Manajer berupaya untuk mengklasifikasikan beban pada bagian tidak berulang dari laporan laba rugi sebagaimana dicontohkan sebagai berikut:

- (a) Ketika perusahaan tidak melanjutkan sebuah segmen bisnis, laba dari segmen tersebut harus dilaporkan terpisah sebagai laba (rugi) dari operasi dihentikan.
- (b) Penggunaan biaya khusus seperti penurunan nilai asset dan biaya restrukturisasi yang telah meroket. Motivasi dalam praktik ini disebabkan oleh kebiasaan sebagian besar analis untuk mengabaikan biaya khusus karena sifatnya yang tidak biasa dan tidak berulang.

2.1.3.7 Indikator Manajemen Laba

Dalam penelitian ini *distribution of earnings* dijadikan sebagai proksi pengukuran manajemen laba, karena dapat menilai faktor – faktor yang mempengaruhi pergerakan laba. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Phillips *et al* (2003) dalam Baradja (2017) manajemen laba dengan pendekatan *distribution of earnings* dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\Delta E = \frac{E_t - E_{t-1}}{MVE_{t-1}}$$

Dimana:

ΔE = perubahan laba

E_t = laba bersih akhir periode

E_{t-1} = laba bersih akhir periode tahun sebelumnya

MVE_{t-1} = *market value of equity* perusahaan I pada tahun t-1 (menggunakan nilai kapitalisasi pasar). Nilai kapitalisasi diukur dengan mengalikan jumlah saham beredar perusahaan I pada akhir tahun t-1 dengan harga saham perusahaan I pada tahun t-1.

2.2 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Aktiva pajak tangguhan muncul apabila penghasilan sebelum pajak lebih kecil dari pada penghasilan kena pajak, maka pajak terutang akan lebih besar dari pada beban pajaknya (Sari, 2014:298-299). Pajak terutang merupakan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan menurut perhitungan akuntansi fiskal, sedangkan beban pajak merupakan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan menurut akuntansi komersial. Hal tersebut akan mengakibatkan adanya selisih antara pajak terutang menurut akuntansi fiskal dengan beban pajak menurut akuntansi komersial. Selisih antara pajak terutang dan beban pajak tersebut akan dicatat sebagai aktiva pajak tangguhan.

Semakin besar perusahaan mencatatkan aktiva pajak tangguhan maka dapat dikatakan bahwa manajer melakukan manajemen laba dalam hal memperbesar laba, hal ini terjadi karena perusahaan akan membayarkan pajak penghasilan sesuai dengan perhitungan akuntansi fiskal. Sehingga dapat dikatakan bahwa aktiva pajak tangguhan memiliki hubungan yang positif dengan manajemen laba.

Penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Timuriana dan Muhamad (2015) yang menguji pengaruh aktiva pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014 dan menunjukkan hasil bahwa aktiva pajak tangguhan memiliki pengaruh secara parsial terhadap manajemen laba.

Fitriany (2015) juga melakukan penelitian tentang aktiva pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013 yang menunjukkan hasil bahwa aktiva pajak tangguhan berpengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen laba.

Sejalan dengan kedua penelitian diatas, Baradja dkk (2017) juga menguji kembali pengaruh aktiva pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada 46 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 yang menunjukkan hasil bahwa aktiva pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Berbeda dengan ketiga penelitian diatas Widiatmoko dan Mayangsari (2015) yang melakukan penelitian mengenai aktiva pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada 208 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2011-2013 yang menunjukkan hasil bahwa aktiva pajak tangguhan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa adanya pengaruh dari aktiva pajak tangguhan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mendeteksi manajemen laba. Sehingga diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H_1 = aktiva pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.2.2 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal memiliki hubungan positif dengan motivasi pajak, dengan adanya hal tersebut maka dimungkinkan manajer dapat melakukan rekayasa laba atau manajemen laba dengan memperbesar atau memperkecil jumlah beban pajak tangguhan yang diakui dalam laporan laba/rugi. Selisih negatif antara laba akuntansi dan laba fiskal mengakibatkan terjadinya beban pajak tangguhan (Djamaludin, 2008:58). Selisih tersebut timbul karena pajak terutang menurut akuntansi fiskal lebih kecil daripada beban pajak menurut akuntansi komersial.

Semakin besar beban yang dicatatkan oleh perusahaan maka akan semakin kecil laba yang akan diperoleh perusahaan. Begitupun sebaliknya, jika beban yang dicatatkan kecil maka semakin besar laba yang akan diperoleh perusahaan. Beban pajak tangguhan yang besar akan mengakibatkan tingkat laba menurun, dengan demikian perusahaan dikatakan melakukan tindakan manajemen laba dalam hal memperkecil laba sehingga perusahaan akan memperoleh peluang untuk membayarkan pajak penghasilan yang kecil dibandingkan dengan yang

seharusnya. Dengan kata lain jika perusahaan mencatatkan beban pajak tangguhan, maka dapat dikatakan bahwa manajemen perusahaan melakukan praktik manajemen laba dalam hal memperkecil laba. Sehingga dapat dikatakan bahwa beban pajak tangguhan memiliki hubungan yang negatif dengan manajemen laba.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitriany (2015) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013.

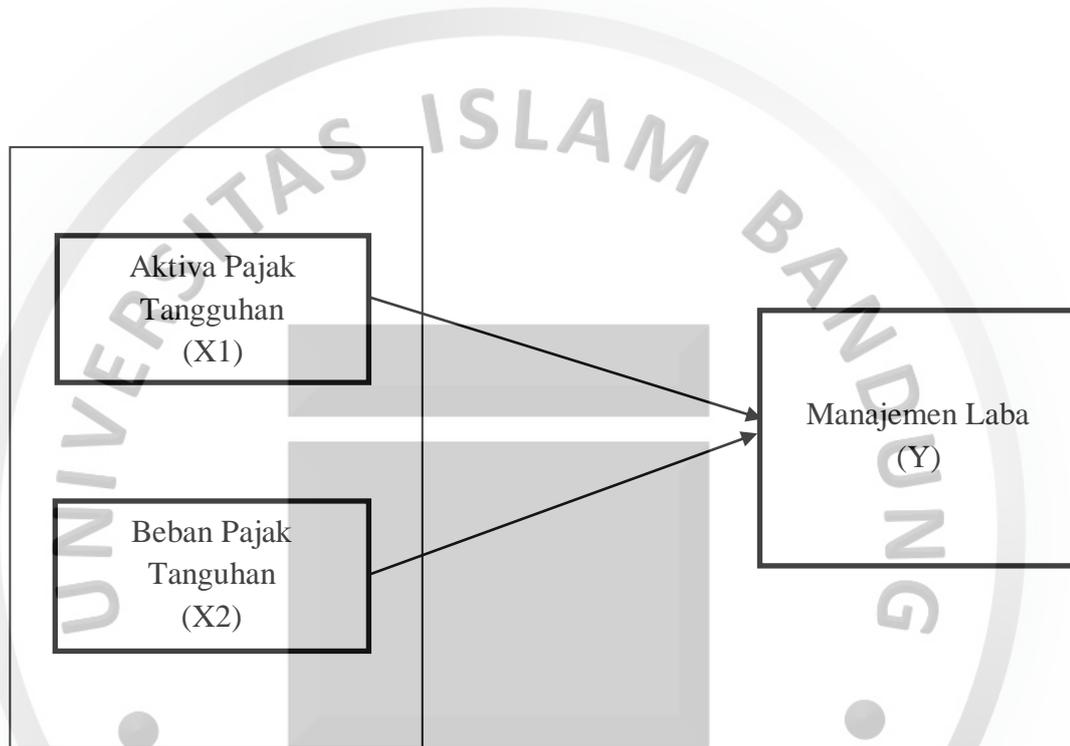
Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Timuriana dan Muhamad (2015) yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2010-2014.

Sedangkan Mulyani dkk (2018) yang juga melakukan penelitian terkait pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada 84 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2014-2015 yang menunjukkan hasil bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.

Berbeda dengan penelitian diatas, Baradja dkk (2017) mengemukakan hasil penelitiannya terkait pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada 46 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 serta Lestari (2008) yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian tersebut beban pajak tangguhan dapat digunakan oleh manajer untuk menaik turunkan tingkat laba yang ingin diperoleh perusahaan. Semakin kecil laba yang diperoleh perusahaan maka akan semakin kecil pula perusahaan membayar pajaknya. Sehingga diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H_2 = beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran